

Judul : DPR ingin ada RS di Mekkah dan Madinah
Tanggal : Sabtu, 25 Juni 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 7

DPR Ingin Ada RS di Mekkah dan Madinah

MADINAH – Kalangan DPR mendorong perlunya segera membangun rumah sakit di Mekkah maupun Madinah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji Indonesia. Kehadiran rumah sakit ini penting karena jumlah jamaah haji Indonesia sangatlah besar sehingga tak memadai jika hanya difasilitasi dilayani dalam bentuk balai, klinik, atau pos.

Dorongan DPR dari Komisi VIII tersebut diungkapkan sesuai melihat kondisi Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah maupun Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) di Mekkah. Anggota Komisi VIII Iskan Qolba Lubis menilai, dengan memiliki rumah sakit sendiri, maka jamaah Indonesia akan mendapatkan pelayanan yang lebih nyaman dan maksimal.

Menurutnya, selama di Madinah, jamaah akan beribadah antara delapan hingga sembilan hari. Sementara di Mekkah, jamaah juga tinggal dalam waktu yang lama sehingga pelayanan kesehatan di dua kota suci ini menjadi penting.

Upaya mendirikan rumah sakit Indonesia ini perlu segera dipikirkan matang. Dia menilai, rencana ini akan mendapatkan respons positif dari Pemerintah Arab Saudi. "Dengan putra mahkota (Arab Saudi) yang sangat terbuka yang tahu melihat standar pelayanan di Amerika bagaimana, di Uni Emirat Arab bagaimana, saya rasa ke depan sangat mungkin kita buat rumah sakit," ujarnya.

Soal kondisi di KKH Madinah, dia menilai pelayanan yang diberikan kepada jamaah sudah baik. Bahkan, dokter dan tenaga kesehatan lainnya bisa memberikan pelayanan maksimal karena jumlah kuota jamaah tahun ini hanya sekitar 50% dari kondisi normal.

Menurut dia, dengan

memiliki rumah sakit Indonesia di Madinah, maka dokter akan bisa memberikan pelayanan lebih mudah. Sebab, selama ini jamaah biasanya mendapatkan obat, makanan, dan pelayanan yang agak berbeda dengan Indonesia.

"Karena obat standar Arab itu kan berbeda dengan kita, tabletnya gede-gede, kita kecil-kecil, dosisnya juga berbeda. Jadi, kita upayakan nanti punya rumah sakit sendiri supaya jamaah bisa tertangani secara optimal," ujarnya.

Iskan menyatakan, secara umum pelayanan yang diberikan pemerintah kepada jamaah haji sudah baik. Dengan persiapan yang mepet, menurut dia, pelayanan pada akomodasi, katering, transportasi, dan lain sebagainya sudah memenuhi harapan DPR.

"Bahkan, kita kalau pulang ke Indonesia, ada dua hal ingin sampaikan. Pertama, umumkan kepada masyarakat bahwa haji itu nggak murah lagi, itu harus kita pahami. Kedua, kita ingin punya badan pengelola keuangan haji, kita ingin buat semacam BUMN untuk penginapan haji misalnya," katanya.

Sekjen Kemenag Nizar Ali menilai, DPR telah banyak mendukung kesuksesan penyelenggaraan haji tahun ini. Pihaknya juga mendukung usulan DPR yang menginginkan adanya rumah sakit khusus Indonesia di Saudi.

Bahkan, lebih dari itu, Kemenag mewacanakan pentingnya Kampung Indonesia yang merupakan Kawasan terintegrasi bagi jamaah haji ke depan.

"Pemerintah ingin lebih jauh dari itu, istilahnya, Kampung Indonesia, ada hotelnya, dapurnya, masjid sementara, rumah sakitnya ada taman bermainnya, itu sudah desain dan sedang dalam proses lobi. Ini wilayahnya adalah ring 1 dengan sini," katanya.

abdulhakim